

# THE PROFESSIONALISM OF THE SUBDISTRICT LEADER IN THE COORDINATION OF THE SOUTHERN PART OF THE SOUTH OF THE TALAUD ISLANDS DISTRICT

VALENTIN NAE  
WELSON Y. ROMPAS  
RULLY MAMBO

*Professionalism is a reflection of the skills and expertise of the apparatus that can be effective if supported by the suitability of the level of knowledge on the basis of educational background with the workload that becomes the responsibility. The success of development will be seen from the high productivity of the prosperous population and evenly distributed. To bring about socio-cultural change of society, it is the duty of all government apparatus and society itself to create and expand and implement the national development programs that are held. To measure professionalism, it can be used some measure professionalism, Which includes : Knowledge, Skill, expertise. This research uses data collection techniques that qualitative descriptive research through data collection techniques that is data reduction, Data presentation, and conclusion. Professionalism is an attitude or circumstance in carrying out the work with the need for expertise. In this study the professionalism of the subdistrict leader in coordinating the area of southern Essang Talaud archipelago district is seen from the indicators namely: ability, Skill, Expertise*

*Keywords : Professionalism of the subdistrict leader*

## PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pemerintah yang beradab di wilayah kecamatan sebagai perpanjangan tangan kabupaten, diharapkan membawa visi misi pembangunan yang diembang dalam kurung waktu tertentu sebagai upaya pencapaian arah dan tujuan pembangunan disegala bidang sebagai mana tertuang pada rencana strategi. Upayah untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsip, transparansi, efektifitas dan efisien.

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkalaku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Olehnya itu untuk mencapai tujuan

pembangunan disemua sektor diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pembangun dan menggerakkan masyarakat untuk serta berperan di dalamnya.

Aparat telah mengembang tugas dan tanggung jawab dalam Koordinasi dengan pemerintah baik pusat, daerah maupun pihak Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat akan pentingnya fungsi koordinasi.

Atas dasar itulah sehingga Penulis melalui kesempatan ini, dicoba menelusuri permasalahan Penerapan profesionalisme Camat dalam pengkoordinasian, hal itu dapat dilihat dari beberapa fenomena yang menjadi keluhan masyarakat seperti pemberian pelayanan yang masih berjalan lambat, penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu, kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat, masih terjadi kesalahan dalam produk pelayanan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Profesionalisme

Menurut Tanri Abeng (Moeljono, 2003) pengertian profesional terdiri atas tiga unsur,

yaitu knowledge, skill dan integrity, selanjutnya ketiga unsur tersebut harus dilandasi dengan iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesediaan untuk belajar terus-menerus. Menurut Siagian (Kurniawan, 2005) profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat. Tugas-tugas di atas masih di breakdown lagi menjadi beberapa bagian yang mana penjabarannya masih dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang sama dalam pasal yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing tugas camat.

1. Pasal 16 PP No.19 Tahun 2008 terkait tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
  - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; (baca juga: RT dan RW di Indonesia)
  - Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Terkait tugas camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum seperti yang dijabarkan pada Pasal 17 PP No.19 Tahun 2008 diantaranya adalah:

- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
3. Pasal 18 PP No. 19 Tahun 2008 menjelaskan tugas camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang memiliki penjabaran sebagai berikut:
    - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
    - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karna penelitiannya dilakukan pada kondisi yang ilmiah (natural setting);disebut juga sebagai metode ednografi, disebut juga sebagai metode

kualitatif, karena data yang dikumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih penelitian adalah Kantor Kecamatan Essang selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.

### **Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Profesionalisme Camat di wilayah Kecamatan Essang selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan pada Teori Tanri Abeng (Moeljono, 2003) Profesionalisme terdiri atas tiga unsur, yaitu, Knowledge, skill dan integrity. Yang berada pada poin pertama.

### **Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak selalu meningkatkan jumlah informan/responden, tetapi lebih meningkatkan content, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden /informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengambilan sampel. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi

1. Camat 1 orang
2. sekretaris kecamatan 1 orang
3. Staf Kecamatan 2 orang
4. kepala Desa 2 orang

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik, Dalam pengumpulan data dan informasi, Data yang dipakai adalah data primer, yang diperoleh dari hasil interview dan data sekunder, yang diambil dari data-data, catatan-catatan dan laporan-laporan serta literatur.

#### **a. Wawancara**

yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih luas dari orang lain atau informan.

Dengan menggunakan metode interview guide yaitu panduan wawancara untuk

mengajukan pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tema penelitian kepada informan. Panduan wawancara ini digunakan oleh penyusun untuk menghindari meluasnya cara pembicaraan wawancara.

#### **b. Dokumentasi**

Tektik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang telah terolah atau tersedia.

#### **c. Observasi**

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang diteliti.

### **Teknik analisis Data**

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini data yang akan didapat berupa data kualitatif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagian besar bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian apa adanya. Dengan analisa diskriptif kualitatif, temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lapangan dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digolongkan secara terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodeologi penelitian diatas bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui profesionalisme camat dalam mengkoordinasikan wilayah Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam Hal ini Profesionalisme Camat diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh seseorang harus sesuai tugas yang diembanya jika tidak maka berdampak pada kefakuman fungsional birokrasi. Evaluasi atau tingkat keberhasilan tersebut dapat diamati dari beberapa indikator kinerja yaitu:

Kemampuan, Keterampilan, Keahlian.

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap beberapa pegawai negeri sipil yang ada di kantor Camat Essang Selatan. Data/informasi yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif. Hasil wawancara dikemukakan berikut ini:

“ Bapak camat selalu mengkoordinasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kecamatan Essang selatan, dalam setiap evaluasi saya selalu tegaskan kepada pegawai yaitu dalam pelayanan harusutamakan keramahan dan senyuman dalam melayani, karna itu adalah hal yang utama di instansi pelayanan publik. (informan Bpk N.T Kasie Pelayanan informasi dan pengaduan)

“ Bapak Camat selalu menanyakan dan meninjau kegiatan serta memastikan apakah kegiatan berjalan dengan baik, dan beliau selalu meminta laporan untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. (Informan Bpk D. M. Sekertaris Kecamatan)

“ Demi meningkatkan kualitas pelayanan camat dalam melaksanakan tugas baik penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di setiap tgl 17 bulan yang berjalan selalu dilaksanakan apel korpri dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja dari aparat kepala desa bersama bersama perangkatnya dan BPD (Badan permusyawaratan Deesa) dan melalui rapat koordinasi tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan bagi pemerintah desa bahkan juga

pemerintah wilayah kecamatan Essang Selatan (informan Bpk S.M. Camat Kecamatan Essang Selatan)

“ Hubungan atau koordinasi yang baik antara camat dengan kepala desa bersama perangkatnya sehingga membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di setiap unit satuan kerja (perangkat daerah) yang ada di wilayah kecamatan Essang selatan sehingga tercapai tujuan (informan Bpk M.M Kepala desa Kuma selatan)

“ Saya sebagai pimpinan harus mendengarkan ide dari bawahan, karna bawahan juga berhak untuk bicara dan memberikan pendapat agar supaya bisa mengerti permasalahan. (informan Bpk S.M. Camat Essang Selatan)

### Hasil Wawancara

#### 1. Kemampuan

Berdasarkan hasil wawancara camat telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan memberikan bimbingan dan arahan kepada pegawai, kepala-kepala desa dan masyarakat baik dalam bentuk apel, upacara maupun rapat-rapat pembinaan.

#### 2. Keterampilan

Dari hasil wawancara bisa dilihat bahwa mengenai tugas bahwa camat sudah sepenuhnya dalam mengkoordinasikan wilayah Kecamatan Essang Selatan pelayanan kemasyarakatan di setiap tanggal 17 bulan yang berjalan selalu di laksanakan apel korpri dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja.

#### 3. Keahlian

Dari hasil wawancara camat sudah berkeahlian dalam menjalankan organisasi di wilayah kecamatan essang Selatan dan sudah sesuai dengan yang diembannya. Camat Sudah sesuai Tugasnya dan fungsinya dengan baik mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

### Pembahasan

Di tingkat kecamatan, camat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah merupakan salah satu komponen dari pada aparat pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pengkoordinator,

penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yang sangat berat.

Proses pengorganisasian dikecamatan dilakukan dengan pendekatan delegasi. Kewenangan yang diberikan baik dalam rangka pengayoman terhadap masyarakat, Kepala-kepala desa maupun aparatur kecamatan. Sistem kinerja pemerintahan kecamatan merupakan suatu kesatuan rangkaian yang saling berhubungan dan berkaitan dengan yang lain. Sistem kinerja organisasi atau tipologi berawal dari keberdayaan' organisasi kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, artinya semakin banyak ruang lingkup tugas pokok dan fungsi kecamatan maka sesungguhnya beban kerjanya semakin bertambah, hal ini dapat diukur dari jumlah kewenangan yang dilimpakan dari Bupati kepada camat.

Konsekuensi logis dari perubahan tentang status kecamatan. Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah atau Sebagai perangkat daerah Camat memiliki kewenangan delegatif atau kewenangan yang dilimpakan oleh Bupati. Selain itu camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan atau yang disebut kewenangan atributif. Proses pengkoordinasian pemerintahan Di Kecamatan Pulau Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud dari hasil penelitian memberi Gambaran bahwa Camat Sudah Profesional karena camat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pengkoordinasian dikecamatan sudah optimal berjalan seperti di dalam pembagian Kerja terhadap perangkat Kecamatan dikecamatan dan Kepala-kepa desa. Kecamatan Essang Selatan Sudah adanya petunjuk teknik pelaksanaan pekerjaan sehingga dari pada itu dari hasil penelitian banyak pegawai semangat pergi kekantor kecamatan karena merudah di perintahkan oleh camat. Disiplin pegawai merupakan kunci dari penerapan strategi pemimpin dalam pengorganisasian pemerintahan, karena bilah pegawai disiplin dengan tepat waktu masuk kerja dapat menunjang dan mempercepat proses pelayanan dikecamatan Essang Selatan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah Mencermati dan mengkaji tentang profesionalisme Camat di kantor Kecamatan Essang Selatan maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Camat Essang Selatan dalam mengelolah administrasi dan mengatur jalanya organisasi dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Dimana selain menggunakan pendekatan secara formal sehingga terjalin kedekatan Emosional dengan bawahanya.
2. Kecakapan atau keterampilan dalam tugas pelayanan di wilayah dapat di katakan masih kurang ditandai dengan persoalan perbedaan pendapat satu sama lain.
3. Profesionalisme Camat dalam pembangunan sangat minim hal disebabkan kondisi pembangunan yang belum terealisasi dengan baik walaupun ada beberapa indicator yang mengenai bukti langsung atau tanggung jawab sosial yang belum maksimal.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat diberikann saran sebagai berikut :  
Pertahankan dan tingkatkan hubungan profesionalisme segingga dalam pengkoordinasian wilayah dapat meningkat dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Memotivasi pegawai dan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menunjukkan arah dan tujuan tertentu yang melakukannya untuk berperan aktif mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pegawai dan kepala-kepala desa serta msyarakat menuju ke arah yang telah ditentukan dengan tetap memberikan arah dan kebutuhan,keinginan,dan harapan pegawai dan kepala-kepala desa. Dengan demikian mereka mau melakukan sesuatu sebagaimana yang telah diperintahkan Camat.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia perlu lebih ditekankan pada aspek kemampuan,keterampilan atau skill,terutama dalam bidang keterampilan konseptual, manajemen, keterampilan teknik dan keterampilan kemanusiaan sehingga aparatur

Kecamatan memiliki keemampuan, keterampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Kecamatan Essang Selatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Karyadi, M. 1985, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Bina Cipta. Bandung.
- Koontz, Harold dan Cyril O.D dan Heinz W. 1986 *Manajemen*. Jilid 2. Terjemahan: gunawan Hutaeruk. Jakarta: Penerbit Jakarta
- LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI, 1992, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*. Jakarta: Puataka Harapan.
- Moeljino. 2007. *Leadership culture jawaban atas tantangan kepemimpinan*, di dalam buku *Compare culture, Challenge to Excellence*, editor: Moeljono.D. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pamudji S, 1993, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara Pemerintahan. PT. Multicerdas Publishing. Jakarta.
- Siagian, P . S. 2005. *Fungsi-fungsi manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Wahyuningrum, 2008. *Hubungan kemampuan, kepuasan dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Groboga*.